

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu. Tahun 2016 merupakan tahun tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 serta tahun awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

Tahun 2013 - 2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (*Pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*Pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*Pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*Pro Environment*) serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Kebijakan pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan melalui proses era otonomi dan reformasi, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 berada pada tahapan lanjutan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan paradigma ini menuntut keniscayaan akan adanya suatu manajemen pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pelaku menjadi fasilitator, akselerator, dan regulator serta lebih diarahkan untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan dengan menyiapkan suatu kondisi yang memungkinkan berkembangnya proses kreatif di masyarakat; disamping dituntut manajemen yang transparan dan dapat dipertanggung-jawab pada berbagai tingkatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di pemerintahan daerah provinsi.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintahan di daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan perubahan di berbagai tatanan pemerintahan di daerah, termasuk didalamnya perubahan kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah.

Selanjutnya guna pencapaian *good governance*, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mengacu kepada terwujudnya pelaksanaan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Hal ini berkaitan dengan kegiatan manajemen pemerintahan yang paling tidak mencakup tiga komponen utama, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi atau mengendalikan. Dalam siklus tersebut, monitoring dan evaluasi merupakan unsur penting yang dapat memberi input balik kepada perencanaan karena evaluasi dapat menilai kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu.

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan kinerjanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit organisasi pemerintah Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. Secara teknis penyusunan LAKIP mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bagian dalam Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab dalam sub sektor peternakan juga menyusun LKIP ini, dengan menggambarkan kinerja selama tahun 2016 yang didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Peternakan.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menjalankan kewenangan Desentralisasi, serta kewenangan lainnya yang berazaskan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerjanya dari hasil pelaksanaan kegiatan berbagai urusan pemerintah daerah pada sub sektor peternakan selama satu tahun.

Didalam konteks perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun suatu capaian pembangunan Jawa Barat dalam bentuk "*Common Goals*" yang diterjemahkan melalui kegiatan sektoral serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Terkait dengan *common goals* tersebut, maka sub sektor peternakan sangat berkepentingan dengan dua hal, yaitu ketahanan pangan, khususnya dalam penyediaan protein hewani asal ternak dan peningkatan daya beli masyarakat. Kontribusi ini tentunya dapat dicapai ketika sub sektor peternakan mampu secara berkelanjutan memberikan insentif kepada seluruh pelaku didalam sektor yang kemudian pada gilirannya akan menjadi "*key driver*" untuk pertumbuhan di sektor-sektor lainnya. Subsektor peternakan mempunyai peranan yang cukup penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah khususnya dari bidang pertanian, hal ini dapat dilihat dari laju peningkatan kontribusi PDRB peternakan terhadap PDRB pertanian yang relatif tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan PDRB pertanian secara keseluruhan.

Menurut BPS Jawa Barat tahun 2016, indeks harga yang diterima dan yang dibayar per sub sektor di Jawa Barat, pada tahun 2015 sub sektor peternakan masing-masing 126.54 dan 115.42. Sementara pada nilai tukar petani gabungan sebesar 105.08. Sementara produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (dalam juta) terhadap pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan serta yang lainnya tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.747.378,7 dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 14.774.347,9. Hal tersebut menunjukkan semakin membaiknya tingkat pendapatan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan produk peternakan yang cenderung semakin meningkat. Selain itu terdapat beberapa aspek makro sub sektor peternakan di Provinsi Jawa Barat yang memberi kontribusi terhadap perekonomian di wilayah. Sub sektor ini mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi rumah tangga peternak. Sehingga hal ini menuntut peran yang lebih tinggi Sub Sektor Peternakan untuk memberikan kontribusi bagi penyediaan kebutuhan pangan hasil ternak sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, dalam pengembangan agribisnis peternakan masih ditemukan berbagai hambatan dan tantangan, mulai dari masalah pra produksi yang meliputi belum adanya satu lembaga perbibitan ternak yang menonjol, tidak banyak swasta yang menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan, harga pakan terutama konsentrat yang relatif mahal dan keterbatasan pakan hijauan, serta kecilnya skala penguasaan dan perusahaan lahan peternak yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan peternak untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain peternak juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Selanjutnya didalam kegiatan sub sistem produksi/budidaya masalah yang dirasakan adalah masih ditemukan lahan pertanian yang beralih fungsi dari lahan produktif menjadi lahan industri dan pemukiman sehingga berdampak pada skala usaha yang masih kecil kurang efisien dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan pasar, tenaga kerja usia produktif di daerah pedesaan semakin kurang berminat terhadap usaha di sektor pertanian sehingga terjadi urbanisasi ke kota besar pada sektor industri dan bangunan, penerapan teknologi yang lambat serta budidaya yang masih konvensional, disamping ancaman penyakit hewan menular strategis yang tinggi yang dapat menimbulkan kerugian sebesar 20% dari produksi.

Pada Tahun Anggaran 2016, dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan pemerintahan di sub sektor peternakan dan pembangunan peternakan di Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi APBD melalui belanja langsung Rp. 77.005.760.086,-, belanja BTL sebesar Rp. 35.453.688.289,- sehingga total anggaran sebesar Rp. 112.459.448.375,-, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, serta target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sementara anggaran APBN sebesar Rp. 18.918.505.000 terdiri dari dekonsentrasi Rp. 10.999.786.000,- dan tugas pembantuan Rp. 7.918.719.000,-.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta informasi penting capaian kinerja organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang telah di realisasikan. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat juga, adalah sebagai

sarana bagi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Gubernur, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan secara baik dan benar, didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat;
2. Menjadikan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenteram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Barat terhadap penyelenggara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, didasari oleh landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu OPD dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai berisi masing-masing sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha ;
2. Penyelenggaraan urusan peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha ;
3. Penyelenggaraan fasilitas peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, dan pengembangan usaha, serta kesekretariatan ;
4. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan peternakan, dengan titik beratnya diarahkan pada peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis, maka susunan organisasi pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagai Pembina dan Penanggungjawab Program.
2. Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala UPTD/Balai (Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi-Kabupaten Majalengka, Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang-Kabupaten Bandung Barat, Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih-Kabupaten Cianjur, Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Cijeunjing-Kabupaten Ciamis, Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati-Kabupaten Garut dengan Sub Unit Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Trijaya-Kabupaten Kuningandan Sub Unit Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Bunihayu-Kabupaten Subang, Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang-Kabupaten Bandung Barat, Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang-Kabupaten Bandung Barat, Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang-Kabupaten Bandung Barat) sebagai Pembina dan Penanggungjawab Kegiatan.
3. Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian dan Kelompok Fungsional Lingkup Dinas sebagai Pelaksana Penyelenggara Teknis Kegiatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan upaya-upaya pembangunan peternakan di Jawa Barat, idealnya subsektor peternakan dapat menjadi sektor pemacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan produktivitas peternakan diindikasikan dapat memicu berputarnya ekonomi regional mengingat bahwa output yang dihasilkan berpotensi memiliki nilai tambah relatif lebih tinggi dari subsektor lainnya. Terciptanya pertumbuhan ekonomi didalam subsektor peternakan Jawa Barat secara langsung akan menimbulkan dampak keterkaitan; keterkaitan ke belakang dalam bentuk meningkatnya permintaan terhadap pasar input usaha ternak, dan keterkaitan ke depan didalam bentuk meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dari rumah tangga peternakan sebagai implikasi dari meningkatnya pendapatan dari usaha ternak tersebut.

Nilai keterkaitan ke depan subsektor peternakan Jawa Barat relatif cukup tinggi terhadap sektor lainnya; bahkan mendekati nilai yang dimiliki oleh sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa output sektor peternakan memiliki peran yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan di sektor-sektor lainnya. Pembangunan peternakan akan sangat relevan dengan karakteristik wilayah yang dimiliki oleh Jawa Barat. Karakteristik yang diperkirakan sangat relevan dengan pembangunan peternakan adalah : Jawa Barat sebagai wilayah konsumsi, Jawa Barat sebagai wilayah produksi, Jawa Barat sebagai basis infrastruktur.

Adapun beberapa isu yang terkait dengan subsektor peternakan di masa depan yaitu : urbanisasi peternakan, pergeseran pola permintaan dan konsumsi pangan, pergeseran pola transaksi, kesehatan konsumen dan kualitas produk peternakan, degradasi iklim dan perubahan lingkungan, serta krisis energi.

Oleh karena itu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Visinya, telah menetapkan sebagai berikut **"Menjadi Akselerator Peningkatan Produksi Peternakan yang Berdaya Saing dan Aman Dikonsumsi Masyarakat Jawa Barat Tahun 2018"**. Untuk mencapai Visi tersebut, maka penerapan kegiatan harus dilaksanakan yang dijabarkan melalui beberapa Misi, yaitu :

- a. Memfasilitasi peningkatan produktivitas ternak dan daya saing produk peternakan di Jawa Barat;
- b. Memfasilitasi usaha peternakan yang berwawasan lingkungan di Jawa Barat;

- c. Mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kondusif di Jawa Barat.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mencapai Visi dan Misi pada Rencana Strategik selama 5 (lima tahun), telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu :

Misi Pertama :

Memfasilitasi peningkatan produktivitas ternak dan daya saing produk peternakan di Jawa Barat ;

Tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan produksi, kualitas, keamanan dan nilai tambah produk peternakan.

Dengan Sasaran Strategik yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya produksi dan populasi ternak ; dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Produksi yang dihasilkan (Daging, Telur, Susu dalam Ton);
 - Jumlah Populasi Ternak (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Domba, Kambing, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Ayam Buras dan Itik dalam Ekor)
- b. Meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan; dengan indikator kinerja:
 - Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI (Daging, Telur, Susu dalam persen)
 - Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu dalam unit.
- c. Meningkatnya aksesibilitas pasar hasil peternakan, dengan indikator kinerja;
 - Jumlah pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional dalam unit.
 - Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP dalam buah.
- d. Meningkatnya kinerja sumber daya dan kelembagaan peternakan, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya dalam kelompok.

Misi Kedua :

Memfasilitasi usaha peternakan yang berwawasan lingkungan di Jawa Barat;

Tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan usaha peternakan yang berkelanjutan.
Dengan Sasaran Strategik yang ingin dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis; dengan indikator kinerja :
 - Prosentase pelaku usaha yang berdaya saing dalam persen.
 - b. Terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dengan indikator kinerja :
 - Jumlah kawasan usaha peternakan dalam kawasan.

Misi Ketiga :

Mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kondusif di Jawa Barat ;

Tujuan yang dicapai adalah :

1. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa.
Dengan Sasaran Strategik yang akan dicapai adalah :
 - a. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa ; dengan indikator kinerja :
 - Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa (Anthrax, AI, Brucellosis dan Rabies dalam kasus/tahun dan prevalensi %).

2.1.3. Strategi, Kebijakan dan Program

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan sub sektor peternakan ditetapkan strategi untuk pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan dan program sebagai berikut :

(1) Strategi

- a. Pengembangan dan penerapan teknologi peternakan
- b. Optimalisasi kinerja sumberdaya dan kelembagaan peternakan
- c. Peningkatan kinerja sumberdaya dan kelembagaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(1) Kebijakan

- a. Peningkatan kuantitas, kualitas, keamanan produk hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- b. Pengembangan usaha, prasarana dan sarana peternakan
- c. Peningkatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan produk hewan

(2) Program

1. **Program Peningkatan Produksi Pertanian**, dengan sasaran meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk peternakan.
2. **Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian**, dengan sasaran meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat serta meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis.
3. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak, dan Ikan**, dengan sasaran terkendalinya hama dan penyakit ternak.
4. **Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan**, dengan sasaran meningkatnya sarana pemasaran hasil peternakan serta meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil peternakan.
5. **Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**, dengan sasaran tersedianya data penurunan emisi gas rumah kaca bidang peternakan untuk penurunan emisi gas rumah kaca di kabupaten/kota di Jawa Barat bidang peternakan sebesar 1.531 ton CO₂ eq dari target sebesar 1.595,24 ton CO₂ eq.
6. **Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, dengan sasaran tercapainya kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi, terwujudnya kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota, serta tersedianya dokumen perencanaan daerah, baik berupa data spasial maupun data sektoral.
7. **Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur**, dengan sasaran terpenuhinya sarana penunjang kesejahteraan pegawai pada tahun 2016 untuk 273 orang berupa PDH, PDH kemeja putih, pakaian olah raga dan pembinaan mental pegawai dan meningkatnya pemahaman aparatur pengelola keuangan dan perpajakan, pemahaman pengelola barang milik daerah dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur, terciptanya SDM yang handal dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah.
8. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja lingkup Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

9. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.
10. **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan sasaran terpeliharanya sarana dan prasarana operasional unit kerja lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
11. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan sasaran meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah melalui kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan yang berlaku.
12. **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**, dengan sasaran meningkatkan pengelolaan data, sehingga data dan informasi pembangunan Jawa Barat tersedia tepat waktu, akurat, dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan serta data dan informasi tersebut tersimpan dalam sistem yang terintegrasi.
13. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian**, dengan tujuan terlaksananya pengembangan fasilitas dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air, irigasi pertanian, dan perluasan area.
14. **Program Pemenuhan Pangan Asal ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**, dengan tujuan terlaksananya pemenuhan daya dukung peningkatan produksi ternak, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing, pengawalan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian, pemutakhiran data base pengolahan hasil peternakan, monitoring dan evaluasi pengolahan hasil peternakan dan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2013-2018

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk mencapai visi dan misinya, telah menetapkan beberapa tujuan strategis yang dapat dicapai melalui sasaran-sasaran stratejik dan indikator kinerjanya. Secara terperinci yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Stratejik dan Target Tahun 2014 - 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Meningkatkan Produksi dan populasi ternak	1.1.1 Jumlah produksi yang dihasilkan (ton) :					
	- Daging	715.901	741.709	768.495	797.661	827.497
	- Telur	204.344	210.664	217.235	224.089	233.232
	- Susu	252.557	261.792	268.797	276.079	283.655
	1.1.2 Jumlah Populasi ternak (ekor) :					
	- Sapi Potong	401.024	447.978	466.272	486.402	508.730
	- Sapi Perah	109.024	140.555	143.774	148.156	152.709
	- Kerbau	109.386	138.017	143.594	149.670	156.318
	- Domba	9.942.711	11.022.084	12.285.690	13.754.734	15.487.426
	- Kambing	2.367.031	2.420.985	2.477.171	2.535.756	2.596.099
	- Ayam Ras Petelur	13.211.939	13.572.330	13.941.114	14.331.790	14.727.929
	- Ayam Ras Pedaging	120.026.952	125.785.511	131.860.302	138.506.124	145.638.730
	- Ayam Buras	27.352.287	28.117.785	28.939.719	29.841.442	30.867.468
	- Itik	9.417.538	9.801.117	10.207.731	10.626.370	11.057.756
1.2 Meningkatkan kualitas dan keamanan produk hewan	1.2.1 Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI (%) :					
	- Daging	60	62	65	68	70
	- Susu	60	62	65	68	70
	- Telur	50	51	52	53	55
	1.2.2 Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknissistem jaminan mutu (%) :	48	54	52	54	56
1.3 Meningkatkan aksesibilitas pasar hasil peternakan	1.3.1 Jumlah pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional (Unit) :	5	5	5	5	5
	1.3.2 Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP (buah)	5	5	5	5	5
1.4 Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan peternakan	1.4.1 Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya (kelompok)	30	30	30	30	30
1.5 Meningkatkan usaha peternakan yang ekonomis	1.5.1 Prosentase pelaku usaha yang berdaya saing {(%)	10	10	10	10	10

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
		Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan	5	5	5	5	5
1.7	Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa :					
	- Anthrax (kasus/tahun)	0	0	0	0	0
	- AI (kasus/tahun)	65	60	55	50	45
	- Brucellosis (prevalensi/%)	4	3,5	3	2,5	2
	- Rabies (kasus/tahun)	0	0	0	0	0

Selain Sasaran Kinerja Strategik tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat juga memiliki sasaran umum, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Populasi

Dalam upaya pencapaian target Jawa Barat didalam ketahanan pangan protein asal ternak, populasi ternak merupakan salah satu tolok ukur utama untuk menghasilkan daging, telur dan susu serta produk ikutannya. Pertumbuhan populasi ternak yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta di Jawa Barat, selama periode tahun 2013–2018 melalui fasilitasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah diproyeksikan meningkat berkisar antara 1,91 s.d 10,81 % per tahun. Secara rinci sasaran peningkatan populasi menurut komoditas ternak adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Populasi Ternak

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)						R (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-18
1.	Sapi Perah	103.832	109.024	140.555	143.774	148.156	152.709	8,47
2.	Sapi Potong	382.949	401.024	447.978	466.272	486.402	508.730	5,88
3.	Kerbau	108.303	109.386	138.017	143.594	149.670	156.318	7,98
4.	Kuda	14.751	15.063	15.334	15.621	15.914	16.215	1,91
5.	Kambing	2.315.395	2.367.031	2.420.985	2.477.171	2.535.756	2.596.099	2,31
6.	Domba	9.275.404	9.942.711	11.022.084	12.285.690	13.754.734	15.487.426	10,81
7.	Ayam Buras	26.624.410	27.352.287	28.117.785	28.939.719	29.841.442	30.867.468	3,00
8.	Ayam Ras Petelur	12.851.898	13.211.939	13.572.330	13.941.114	14.331.790	14.727.929	2,76
9.	Ayam Ras Pedaging	114.634.327	120.026.952	125.785.511	131.860.302	138.506.124	145.638.730	4,90
10.	Itik	9.096.570	9.417.538	9.801.117	10.207.731	10.626.370	11.057.756	3,98

2. Peningkatan Produksi Hasil Ternak

Salah satu Indikator keberhasilan dari agregat peningkatan populasi dengan peningkatan produktivitas ternak dapat dicitrakan melalui gambaran dari peningkatan

produksi hasil ternak. Sasaran peningkatan produksi ternak pada periode tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Produksi Hasil Ternak

No	Jenis Ternak	Produksi Hasil Ternak (Ton)						R (%) 13-18
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	Daging	692.191.196	715.901.065	741.708.741	768.495.149	797.660.834	827.497.496	3,64
1	Sapi Lokal	73.721.604	77.249.374	80.774.792	84.491.196	88.363.986	92.428.462	4,63
2	Sapi Impor	2.893.625	3.042.567	3.199.954	3.348.890	3.505.076	3.668.957	4,86
3	Kerbau	2.602.515	2.689.572	2.793.565	2.888.870	2.977.580	3.075.642	3,40
4	Domba	29.013.851	30.585.844	32.289.790	34.133.102	36.131.986	38.305.770	5,71
5	Kambing	8.618.463	9.112.643	9.617.179	10.169.900	10.766.107	11.692.231	6,30
6	Kuda	34.473	35.317	36.184	37.078	37.997	38.944	2,47
7	Ayam Buras	24.536.354	25.006.794	25.683.541	26.320.463	26.984.383	27.670.100	2,43
8	Ayam Ras Petelur	4.968.561	5.115.710	5.297.919	5.490.105	5.692.781	5.906.841	3,52
9	Ayam Ras Pedaging	538.874.274	555.814.061	574.557.229	593.887.042	615.186.748	636.410.017	3,38
10	Itik	5.871.479	6.081.125	6.295.315	6.511.637	6.730.188	6.950.599	3,43
II	Telur	198.854.391	204.344.451	210.663.912	217.235.447	224.088.710	233.232.415	3,24
1	Ayam Buras	18.290.492	18.685.060	19.158.217	19.664.305	20.222.780	20.833.222	2,64
2	Ayam Ras	130.741.443	134.200.792	138.348.245	142.668.576	147.167.092	153.854.918	3,31
3	Itik	49.822.456	51.458.600	53.157.449	54.902.566	56.698.838	58.544.274	3,28
III	Susu	242.929.234	252.557.349	261.791.641	268.796.694	276.078.975	283.655.405	3,15

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

2.3.1. Sasaran Strategik dan Indikatornya

Arah kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan populasi ternak ; dengan indikator kinerja:

- Jumlah Produksi yang Dihasilkan
 - Daging sebanyak 768.495 ton
 - Telur sebanyak 217.235 ton
 - Susu sebanyak 268.797 ton
- Jumlah Populasi Ternak
 - Sapi potong sebanyak 466.272 ekor
 - Sapi perah sebanyak 143.774 ekor
 - Kerbau sebanyak 143.594 ekor
 - Domba sebanyak 12.285.690 ekor
 - Kambing sebanyak 2.477.171 ekor
 - Ayam Ras Petelur sebanyak 13.941.114 ekor
 - Ayam Ras Pedaging sebanyak 131.860.302 ekor
 - Ayam Buras sebanyak 28.939.719 ekor
 - Itik sebanyak 10.207.731 ekor

2. Meningkatkan kualitas dan keamanan produk hewan; dengan indikator kinerja:
 - Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI :
 - Daging sebesar 65 %
 - Sapi susu sebesar 65 %
 - Susu sebesar 52 %
 - Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu sebesar 52 %.
3. Meningkatnya aksesibilitas pasar hasil peternakan, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Pelaku Usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional sebanyak 5 unit
 - Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang memenuhi standar pelayanan minimal dan SOP sebanyak 5 buah.
4. Meningkatnya kinerja sumber daya dan kelembagaan peternakan, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya sebanyak 30 kelompok.
5. Meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis, dengan indikator kinerja :
 - Prosentase pelaku usaha yang berdaya saing sebesar 10 %
6. Terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan, dengan indikatornya adalah :
 - Jumlah kawasan usaha peternakan sebanyak 5 kawasan
7. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa; dengan indikator kinerja :
 - Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa :
 - Anthrax sebanyak 0 kasus/tahun
 - Rabies sebanyak 0 kasus/tahun.
 - AI sebanyak 55 kasus/tahun
 - Prevalensi Brucellosis sebesar 3 %

Serta sebagai tolok ukur pencapaian visi dan misi serta tujuan pembangunan peternakan ditetapkan sasaran umum dengan :

- a. Peningkatan populasi ternak;
- b. Peningkatan penyediaan konsumsi daging, telur dan susu; dan
- c. Peningkatan produksi hasil ternak.

Dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4. Sasaran Populasi dan Produksi Hasil Ternak Tahun 2016

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2016 (ekor)	No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2016 (ton)
I.	Populasi Ternak :			II.	Produksi :		
1.	Sapi Potong	Ekor	466.272	1.	Daging		768.495
2.	Sapi Perah	Ekor	143.774	1.	- Sapi Lokal	Ton	84.491
3.	Kerbau	Ekor	143.594	2.	- Sapi Impor	Ton	3.349
4.	Kuda	Ekor	15.621	3.	- Kerbau	Ton	2.884
5.	Kambing	Ekor	2.477.171	4.	- Kambing	Ton	10.170
6.	Domba	Ekor	12.285.690	5.	- Domba	Ton	34.133
7.	Ayam Buras	Ekor	28.939.719	6.	- Kuda	Ton	37
8.	Ayam Ras Petelur	Ekor	13.941.114	7.	- Ayam Buras	Ton	26.320
9.	Ayam Ras Pedaging	Ekor	131.860.302	8.	- Ayam Ras Petelur	Ton	5.490
10.	Itik	Ekor	10.207.731	9.	- Ayam Ras Pedaging	Ton	593.887
				10.	- Itik	Ton	6.512
				II.	Telur		217.235
				1.	- Ayam Buras	Ton	19.664
				2.	- Ayam Ras	Ton	142.669
				3.	- Itik	Ton	54.903
				III.	Susu	Ton	268.797

2.3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan peternakan di Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebagai berikut :

Tabel 5. Alokasi Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
			MURNI	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	13	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	129.000.000	129.000.000
2	29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	450.000.000	448.500.000
3	59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1.148.000.000	1.110.669.000
3	60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.238.360.500	5.193.376.774
4	61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.392.002.500	23.593.106.127
5	62	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.091.718.500	5.904.257.700
6	66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	238.000.000	238.000.000
7	79	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	450.000.000	450.000.000
8	86	Program Peningkatan Produksi Pertanian	30.903.396.770	29.684.542.985
9	87	Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	2.208.100.000	2.194.886.000
10	88	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	4.868.180.000	4.784.604.000
11	89	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	3.244.817.500	3.274.817.500
TOTAL BELANJA LANGSUNG			80.361.575.770	77.005.760.086

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Untuk mendukung pengukuran kinerja, diperlukan berbagai perangkat yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Perangkat yang digunakan berupa data dan informasi. Jenis data yang dapat digunakan terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengukuran kinerja ini, jenis data yang digunakan sebagian besar adalah data sekunder baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang berkaitan dengan angka atau numerik, khusus yang menyangkut kegiatan pembangunan peternakan di Jawa Barat. Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan pencapaian hasil yang diuraikan dalam bahasa kualitatif seperti tercapainya hingga sekian persen, sedangkan sumber data lebih menekankan darimana data atau informasi tersebut diperoleh. Data sekunder yang diperlukan untuk mengukur kinerja peternakan ini berasal dari berbagai sumber, yaitu untuk data populasi, produksi dan konsumsi dari data kabupaten/kota yang diolah; sedangkan untuk data PDRB dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan pengukuran skala ordinal untuk memberikan makna capaian maka ditentukan batasan penilaian sebagai berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
> 100 %	Sangat Baik (SB)
80 – 100 %	Baik (B)
50 - 80 %	Sedang (S)
< 50 %	Kurang (K)

3.1.2. Pengukuran Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, serta ditindak lanjuti dengan DPA pada Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016. Hasil pengukuran sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Pengukuran Capaian Misi, Sasaran Stratejik, dan Indikator Kinerja Tahun 2016.

No	Misi/Sasaran Stratejik	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Capaian	Rata-Rata Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Visi : Menjadi Akselerator Peningkatan Produksi Peternakan yang Berdaya saing dan Aman Dikonsumsi Masyarakat Tahun 2018						114,40	SB	
I	Misi 1 : Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas ternak dan daya saing produk peternakan di Jawa Barat							131,83 (SB)
1	Sasaran Stratejik : Meningkatkan Produksi dan populasi ternak							104,90 (SB)
		1.1 Jumlah produksi yang dihasilkan :						125,69 (SB)
		- Daging	Ton	768.495	992.770 *	129,18	SB	
		- Telur	Ton	217.235	253.712 *	116,79	SB	
		- Susu	Ton	268.797	352,390*	131,10	SB	
		1.2 Jumlah Populasi ternak:						84,11 (B)
		- Sapi Potong	Ekor	466.272	410.934	88,13	B	
		- Sapi Perah	Ekor	143.774	119.590	83,18	B	
		- Kerbau	Ekor	143.594	103.362	71,98	S	
		- Domba	Ekor	12.285.690	10.040.345	81,72	B	
		- Kambing	Ekor	2.477.171	1.229.005	49,61	K	
		- Ayam Ras Petelur	Ekor	13.941.114	14.437.891	103,56	SB	
		- Ayam Ras Pedaging	Ekor	131.860.302	107.611.695	81,61	B	
		- Ayam Buras	Ekor	28.939.719	26.654.714	92,10	B	

No	Misi/Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Capaian	Rata-Rata Capaian
		- Itik	Ekor	10.207.731	10.724.863	105,07	SB	
2	Sasaran Strategik : Meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan							122,44 (SB)
		2.1 Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI :						133,33 (SB)
		- Daging	%	65	87	133,85	SB	
		- Telur	%	65	83	127,69	SB	
		- Susu	%	52	72	138,46	SB	
		2.2 Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/ rekomendasi teknis sistem jaminan mutu :	Unit	52	58	111,54	SB	111,54 (SB)
3	Sasaran Strategik : Meningkatnya aksesibilitas pasar hasil peternakan							200,00 (SB)
		3.1 Jumlah pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional	Unit	5	15	300	SB	300,00 (SB)
		3.2 Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang memenuhi standar minimal dan SOP	Buah	5	5	100	B	100,00 (B)
4	Sasaran Strategik : Meningkatnya kinerja sumber daya dan kelembagaan peternakan							100,00 (B)
		4.1 Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya	Kelompok	30	30	100,00	B	100,00 (B)
II	Misi 2 : Memfasilitasi Usaha Peternakan yang Berwawasan Lingkungan di Jawa Barat							100,00 (B)
5	Sasaran Strategik : Meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis							100,00 (B)
		5.1 Presentase pelaku usaha yang berdaya saing	%	10	10	100,00	B	100,00 (B)
6	Sasaran Strategik : Terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan							100,00 (B)
		6.1 Jumlah kawasan usaha peternakan	Kawasan	5	5	100,00	B	100,00 (B)

No	Misi/Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Capaian	Rata-Rata Capaian
III.	Misi 3 : Mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kondusif di Jawa Barat							111,36 (SB)
7	Sasaran Strategik : Terkendalnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa							111,36 (SB)
		7.1 Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa :						111,36 (SB)
		- Anthrax	Kasus/tahun	0	0	100,00	B	
		- AI	Kasus/tahun	55	50	110	SB	
		- Brucellosis	Prevalensi	3	2,10	142,86	SB	
		- Rabies	kasus/tahun	0	2	92,59	B	

Keterangan : * angka sementara

3.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 3 Misi, 7 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja diperoleh rata-rata capaian untuk OPD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai kinerja **SANGAT BAIK** (114,40%), yang diperoleh dari rata-rata capaian 3 Misi. Rata-rata capaian untuk Misi Pertama memfasilitasi peningkatan produktivitas ternak dan daya saing produk peternakan di Jawa Barat mempunyai kinerja **SANGAT BAIK** dengan nilai 131,83%, Misi Kedua memfasilitasi usaha peternakan yang berwawasan lingkungan di Jawa Barat mempunyai kinerja **BAIK** dengan 100,00%, Misi Ketiga mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kondusif di Jawa Barat mempunyai kinerja **SANGAT BAIK** (111,36 %).

Pada Misi Pertama mempunyai nilai **SANGAT BAIK**, capaian tersebut diperoleh dari 4 Sasaran Strategiknya; dimana terdapat 3 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja **SANGAT BAIK** yaitu untuk Sasaran Strategik : 1), Meningkatnya Produksi dan Populasi Ternak, 2) Meningkatnya Kualitas dan Keamanan Produk dan 3), Meningkatnya Aksesibilitas Pasar Hasil Peternakan. Sedangkan untuk sasaran strategik yaitu meningkatnya kinerja kelembagaan peternakan masing-masing mempunyai rata-rata capaian kinerja yang **BAIK**.

Analisa dari masing-masing rata-rata capaian sasaran strategik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategik : Meningkatnya Produksi dan Populasi Ternak; mempunyai rata-rata capaian 104,90 % (**SANGAT BAIK**) diperoleh dari beberapa target dan realisasi capaian beberapa indikator kinerja antara lain sebagai berikut :
 - a. Target indikator kinerja untuk jumlah produksi daging sebanyak 768.495 ton, produksi telur sebanyak 217.235 ton, produksi susu sebanyak 268.797 ton. Selama tahun 2016 telah dihasilkan produksi daging sebanyak 992.770 ton, telur sebanyak 253.712 ton, dan susu sebanyak 352.390 ton. Pada tabel diatas tampak bahwa realisasi produksi daging, telur dan susu telah mencapai target dengan kinerja **SANGAT BAIK**. Tercapainya indikator kinerja jumlah produksi daging disebabkan dampak dari meningkatnya populasi sapi potong dan impor daging beku. Tercapainya indikator kinerja jumlah produksi telur merupakan dampak dari naiknya populasi ayam ras petelur dan ayam buras dan adanya ganti bulu yang rontok sehingga produktivitas telur yang dihasilkan meningkat. Realisasi susu oleh karena meningkatnya populasi sapi perah sebagai dampak ternak yang bunting ditahun lalu cukup banyak dibandingkan dengan pedet maupun dara.
 - b. Realisasi capaian indikator kinerja jumlah populasi ternak untuk 9 komoditi ternak sampai dengan tahun 2016 yang telah melebihi target jumlah populasi sebanyak 2 (dua) komoditi ternak yaitu ayam ras petelur dan itik sehingga menunjukkan kinerja **SANGAT BAIK**, 5 (lima) komoditi ternak yang lain yaitu sapi potong, sapi perah, domba, ayam pedaging dan ayam buras masih belum mencapai target sehingga menunjukkan kinerja yang **BAIK**, sedangkan 2 (dua) komoditi lainnya populasi ternak kerbau dan kambing menunjukkan kinerja yang **SEDANG** dan **KURANG**.

Capaian ternak ayam ras petelur melebihi target oleh karena meningkatnya populasi **ternak ayam petelur** maupun **itik**, berakhirnya ganti bulu dan adanya peternak baru. Jumlah populasi **sapi potong** tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan banyak sapi betina yang dipotong, peternak banyak yang lebih menyukai memelihara pejantan daripada betina sehingga kurangnya pembibitan ternak. Penurunan populasi ternak **sapi perah** secara khusus akibat banyaknya ternak sapi perah yang keluar Provinsi Jawa Barat, harga susu yang masih rendah diikuti harga konsentrat semakin tinggi sehingga menurunkan semangat

peternak untuk beternak sapi perah. Penurunan populasi ternak **kerbau** secara khusus akibat peternak jarang memelihara ternak kerbau dan fungsi ternak kerbau untuk pembajakan sawah digantikan dengan traktor.

Penurunan populasi ternak **domba** secara khusus akibat banyak ternak domba yang keluar dari Provinsi Jawa Barat dan banyak pemotongan ternak domba untuk menutupi kekurangan daging sapi potong. Sementara penurunan ternak **kambing** selain disebabkan banyaknya terutama banyaknya permintaan pemotongan untuk hewan qurban di daerah Jabodetabek, juga menurunnya minat untuk beternak kambing, serta ada sebagian wilayah Jawa Barat yang beralih fungsi lahan peternakan yang cukup luas menjadi waduk seperti salah satunya Waduk Jati Gede.

Penurunan populasi **ternak secara umum** akibat alih fungsi lahan sehingga lahan rumput dan kandang semakin sempit, harga pakan konsentrat semakin tinggi sehingga biaya produksi semakin tinggi, minat untuk beternak yang semakin menurun dan beralih ke sektor industri pariwisata, manufaktur, garmen, jasa dll.

2. Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas dan Keamanan Produk Hewan mempunyai rata-rata capaian sebesar 122,44 % (**SANGAT BAIK**), kinerja tersebut diperoleh dari beberapa indikator kinerja dengan target dan realisasinya sebagai berikut :
 - a. Target Prosentase produk pangan asal hewan yang sesuai SNI untuk daging sebesar 65%, realisasi 87% (133,85%) menunjukkan kinerja **SANGAT BAIK**. Target telur sebesar 65 %, realisasi 83% (127,69%) menunjukkan kinerja **SANGAT BAIK**, Target susu 52%, realisasi 72% (138,46 %) menunjukkan kinerja **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas produk peternakan (daging, telur, susu) karena adanya kesadaran dalam peningkatan penanganan produk mulai dari produsen sampai ke pelaku usaha lainnya.
 - b. Target jumlah unit usaha yang mendapat sertifikasi/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu sebesar 52 unit dengan realisasi 58 unit atau 111,54 % menunjukkan hasil indikator kinerja yang **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan karena adanya kemudahan fasilitasi administrasi persyaratan kepada pelaku usaha untuk sertifikasi/rekomendasi dan juga meningkatnya kualitas produk peternakan (daging, telur, susu) karena

adanya peningkatan penanganan produk mulai dari produsen sampai ke pelaku usaha lainnya.

3. Sasaran strategis : Meningkatnya Aksesibilitas Pasar Hasil Peternakan mempunyai rata-rata capaian sebesar 200 % (**SANGAT BAIK**), kinerja tersebut diperoleh dari 2 indikator kinerja dengan beberapa target dan realisasi sebagai berikut :
 - a. Jumlah pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional dengan target sebesar 5 unit pelaku usaha dengan realisasi 15 unit usaha menunjukkan kinerja **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan banyaknya permintaan akan produk-produk peternakan kepada pelaku agribisnis Jawa Barat dari stakeholder tingkat regional dan nasional melalui kegiatan promosi produk, pengembangan jaringan bisnis dan komunikasi calon mitra, promosi potensi investasi agribisnis dan agroindustri, kunjungan kerja beberapa OPD Provinsi Luar Jawa Barat dan informasi kepada OPD Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat sehingga terjadi transaksi jual beli atau pemesanan kepada beberapa pelaku usaha yang berada di Provinsi Jawa Barat.
 - b. Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang memenuhi standar pelayanan minimal dan SOP dengan target 5 buah dan realisasinya 5 buah, sehingga menunjukkan kinerja yang **BAIK**. Hal ini terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya oleh karena disesuaikan permintaan kebutuhan sarana pemasaran di kabupaten/kota dan ada beberapa Kabupaten/Kota memperoleh alokasi anggaran bersumber APBN untuk membangun sarana pemasaran peternakan.
4. Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, mempunyai rata-rata capaian sebesar 100% (**BAIK**), kinerja tersebut dengan indikator kinerja jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya dengan target 30 kelompok sedangkan realisasinya sebesar 30 kelompok sehingga menunjukkan kinerja yang **BAIK**. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kinerja kader-kader perekonomian rakyat yang berwawasan agribisnis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendukung operasionalisasi sumberdaya-sumberdaya tersebut sehingga setiap tahun terdapat para kelompok-kelompok tani ternak yang berprestasi yang setelah melalui seleksi dan penilaian secara bertahap mendapat penghargaan sehingga prestasi dan dinamika masyarakat peternak dalam pengembangan agribisnis

pangan hasil ternak melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha terus berkembang.

Pada Misi Kedua mempunyai nilai **BAIK**, capaian tersebut diperoleh dari 2 Sasaran Strategiknya; dimana dari 2 sasaran tersebut diperoleh rata-rata capaian kinerja **BAIK** yaitu dengan Sasaran Strategik : Meningkatnya Usaha Peternakan yang Ekonomis, dan Sasaran strategik : Terfasilitasinya Kawasan Usaha Peternakan yang Berwawasan Lingkungan.

Analisa dari masing-masing rata-rata capaian sasaran strategik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategik : Meningkatnya Usaha Peternakan yang Ekonomis, mempunyai rata-rata capaian sebesar 100% (**BAIK**), kinerja tersebut dengan indikator kinerja Prosentase Pelaku Usaha yang Berdaya Saing dengan target sebesar 10 % dan realisasinya sebesar 10 % sehingga menunjukkan kriteria kinerja yang **BAIK**. Hal ini disebabkan adanya perbaikan usaha peternakan yang lebih efisien dan efektif, beberapa pelaku usaha di Jawa Barat diantaranya telah melakukan *business matching* dengan pelaku pemasaran di beberapa provinsi lain sehingga terjadi kerjasama pemasaran produk-produk peternakan.
2. Sasaran strategik : Terfasilitasinya Kawasan Usaha Peternakan yang Berwawasan Lingkungan, mempunyai rata-rata capaian sebesar 100% (**BAIK**), kinerja tersebut dengan indikator kinerja jumlah kawasan usaha peternakan dengan target sebanyak 5 kawasan dan realiasinya 5 kawasan, sehingga menunjukkan kriteria kinerja **BAIK**. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kawasan peternakan yang mengajukan fasilitasi sarana pengolahan limbah peternakan di wilayah Kabupaten Subang, Tasikmalaya, Garut, Sumedang dan Purwakarta berupa kompos dan biogas. Adapun komoditas ternak yang di fasilitasi yaitu sapi potong.

Pada Misi Ketiga mempunyai nilai **SANGAT BAIK**, capaian tersebut diperoleh dari Sasaran Strategik : Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa; dimana dari sasaran tersebut diperoleh rata-rata capaian kinerja **SANGAT BAIK**.

Analisa dari rata-rata capaian sasaran strategik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategik : Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa, mempunyai rata-rata capaian sebesar 110,05 % (**SANGAT BAIK**),

kinerja tersebut dengan indikator kinerja Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa. Beberapa target kinerja untuk jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa adalah :

- Penyakit **Anthrax** 0 kasus/tahun, realisasi 0 kasus selama tahun 2016 menunjukkan kinerja yang **BAIK**, hal ini disebabkan terkendalinya penyakit anthrax di daerah endemis yang ditandai dengan tidak adanya kasus (0 Kasus) pada hewan.
- Penyakit **Avian Influenza (AI)** target sebanyak 55 kasus, realisasi pada tahun 2016 sebanyak 50 kasus menunjukkan kinerja yang **SANGAT BAIK** disebabkan meningkatnya kasus pada ternak ayam pedaging dan unggas air, walaupun terjadi peningkatan kasus AI namun terjadi penurunan daerah kasus di beberapa kabupaten.
- Penyakit **Brucellosis** dengan target prevalensi sebesar 3 %, realisasi pada tahun 2016 sebesar 2,10 % hal ini menunjukkan kinerja **SANGAT BAIK**, dengan kebijakan vaksinasi tidak dilakukan diseluruh wilayah Jawa Barat namun hanya dilakukan di Kabupaten/Kota yang prevalensinya > 2%.
- Penyakit **Rabies** ditargetkan sebanyak 0 kasus/tahun, sedangkan realisasinya selama tahun 2016 terdapat penyakit rabies di Jawa Barat sebanyak 2 kasus, hal ini menunjukkan kinerja kriteria yang **SEDANG** karena masih ditemukannya kasus positif rabies dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang dikirim serta dari laporan penggigitan. Hal ini menunjukkan bahwa, belum semua kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa di Jawa Barat dapat terkendali.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut diatas, juga dilakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil yang diperoleh dibandingkan dengan tahun 2015, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016

No	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)		% Peningkatan
				2015	2016	
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi dan populasi ternak			114,48	132,15	20,67
		1.1 Jumlah produksi yang dihasilkan :		95,70	125,69	29,99
		- Daging	Ton	91,80	129,18	37,38
		- Telur	Ton	99,80	116,79	16,99

No	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)		% Peningkatan
				2015	2016	
1	2	3	4	6	7	8
		- Susu	Ton	95,50	131,10	35,60
		1.2 Jumlah Populasi ternak :		95,21	84,11	-11,10
		- Sapi Potong	Ekor	95,10	88,13	-6,97
		- Sapi Perah	Ekor	82,80	83,18	-0,38
		- Kerbau	Ekor	80,20	71,98	-8,22
		- Domba	Ekor	105,00	81,72	-23,28
		- Kambing	Ekor	107,80	49,61	-58,19
		- Ayam Ras Petelur	Ekor	106,60	103,56	-3,04
		- Ayam Ras Pedaging	Ekor	82,70	81,61	-1,09
		- Ayam Buras	Ekor	97,80	92,10	-5,70
		- Itik	Ekor	98,90	105,07	6,17
2	Meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan			120,47	122,44	1,97
		2.1 Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI :		137,23	133,33	-3,90
		- Daging	%	114,50	133,85	19,35
		- Telur	%	140,30	127,69	-12,61
		- Susu	%	156,90	138,46	-18,44
		2.2 Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu :	Unit	103,70	111,54	7,84
3	Meningkatnya aksesibilitas pasar hasil peternakan			130,00	200,00	70,00
		3.1 Jumlah unit pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional	Unit	100,00	300	200
		3.2 Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang memenuhi standar minimal dan SOP	Unit	160,00	100	-60
4	Meningkatnya kinerja kelembagaan peternakan			100,00	100,00	0
		4.1 Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya	Kelompok	100,00	100	0
5	Meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis			100,00	100,00	0
		5.1 Presentase pelaku usaha yang berdaya saing	%	100	100	0
6	Terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan			100,00	100,00	0

No	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)		% Peningkatan
				2015	2016	
1	2	3	4	6	7	8
		6.1 Jumlah kawasan usaha peternakan	Kawasan	100,00	100	0
7	Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa			131,80	111,36	-20,44
		7.1 jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa :		131,80	111,36	-20,75
		- Anthrax	Kasus/tahun	100,00	100,00	0
		- AI	Kasus/tahun	148,10	110,00	-38,10
		- Brucellosis	Prevalensi	98,00	142,86	44,86
		- Rabies	kasus/tahun	181,10	92,59	-88,51

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pencapaian target pada sasaran strategik tahun 2016 bila dibandingkan dengan pencapaian target sasaran strategik pada tahun 2015, maka terlihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang menurun antara lain untuk :

Jumlah produksi yang dihasilkan daging, telur dan susu secara keseluruhan umumnya terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing daging 37,38 %, telur 16,99 % dan susu 35,60 % dengan rata-rata kenaikan sebesar 29,99%. Sedangkan pertumbuhan telur ayam buras dan telur ayam ras menurun. Kenaikan produksi daging, telur dan susu merupakan dampak dari kenaikan produktivitas ternak dimana terus meningkat terutama pada ayam ras pedaging yang melimpah disamping ayam ras petelur seiring meningkatnya jumlah peternak. Sedangkan sapi pedaging terutama sapi potong ditunjang oleh pasokan daging impor. Tingkat konsumsi daging, telur dan susu meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat, yang sekitar 1,48 % di tahun 2015. Sedangkan penyediaan produksi daging, telur dan susu di Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan. Tercapainya produksi daging oleh karena indikator kinerja jumlah produksi daging selain disebabkan dampak dari meningkatnya jumlah populasi sapi potong tetapi didukung kuat oleh adanya produksi daging ayam bukan ras yang sangat tinggi, serta ditunjang lain dengan ditutupi impor daging beku, ternak afkiran lainnya. Tercapainya produksi susu oleh karena adanya parameter teknis produksi susu ternak

sapi perah yang mengalami pergeseran produksi susu dari biasanya 13,5 liter perhari menjadi 14,76 liter per hari sehingga produksi susu cukup tinggi. Sedangkan produksi telur. Sedangkan produksi telur disebabkan oleh karena produksi ayam petelur yang cukup tinggi diiringi selesainya proses ganti bulu pada tahun sebelumnya dan di ditunjang pula oleh produksi telur ayam buras dan puyuh.

- Jumlah populasi ternak umumnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya sekitar -11,10%, dari 9 (sembilan) komoditi hanya ternak sapi perah dan ternak itik yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,38 % dan 6,17 % walaupun realisasi yang dicapai sesuai target. Penurunan terbesar terdapat pada ternak domba dan kambing masing-masing sebesar -23,28 dan -58,19. Umumnya penurunan ini diakibatkan dari alih fungsi lahan terutama di daerah karawang. Minat masyarakat menjadi peternak semakin menurun dan kurang menarik lagi yang bergeser kepada bidang lain yang lebih menjanjikan. Khusus Untuk populasi sapi perah hal ini disebabkan karena naiknya harga konsentrat dan kelangkaan pakan hijauan yang disebabkan karena kemarau berkepanjangan sementara nilai jual susu relatif tetap, oleh karena itu banyak peternak yang menjual ternaknya keluar Provinsi Jawa Barat. Untuk ternak kerbau karena banyak yang tidak memelihara disebabkan kerbau yang biasanya untuk membajak sawah diganti oleh traktor dan preferensi daging kerbau rendah sehingga peternak sudah jarang membudidayakan ternak kerbau. Untuk ayam ras pedaging hal ini disebabkan karena kenaikan pakan yang tinggi, berdampak terhadap biaya produksi tinggi sedangkan harga ayam di kandang tidak seimbang dengan biaya produksi, kondisi ini mengakibatkan banyaknya peternak yang mengalami kerugian. Selain itu, khusus di perkotaan terjadi alih fungsi lahan peternakan menjadi perumahan, banyak peternak yang tergusur dan tidak membudidayakan kembali ayam ras pedaging, karena dipengaruhi faktor diantaranya laporan masyarakat yang keberatan dengan adanya peternakan ayam ras pedaging sehingga peternakan yang dekat dengan wilayah pemukiman terpaksa berpindah lokasi bahkan beralih profesi. Selain itu pengaruh inflasi naik dan turunnya harga ayam dalam kurun waktu tahun 2016 juga menjadi faktor penyebab turunnya populasi ayam ras pedaging. Populasi ternak umumnya dalam rangka meningkatkan populasi Sumber Daya Genetik (SDG) sapi pasundan, penetapan bibit-bibit Sapi Perah, Sapi

Potong, Domba Garut, Kambing PE dan Ayam Pelung melalui Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) untuk 9 Ekor bibit Sapi Perah, 9 Sapi potong, 12 Ekor Domba Garut, 6 Ekor kambing PE. Pmbibitan ternak sapi perah di 7 lokasi Sentra Peternakan Rakyat, ternak domba di Sentra Peternakan Rakyat. pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) untuk meningkatkan kebuntingan ternak sapi di Jawa Barat dari 66 % menjadi 70%. Peningkatan populasi ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau) sekitar 8 %. replikasi generasi atau turunan ke 4 (F4) ayam sentul dari 3.983 ekor menjadi 4.516 ekor dan replikasi generasi atau turunan ke 4 (F4) itik rambon dari 1.044 menjadi 1.486 ekor. penjarangan untuk dilakukan pemuliaan ternak melalui pola perkawinan terstruktur, terhadap setiap generasi (keturunan) dengan Pejantan Unggul yang berbeda hingga memperoleh tingkat kemurnian sapi Pasundan 96.87% pada generasi ke lima (F5).

- Untuk prosentase produk peternakan yang sesuai SNI daging dimana Target Renstra 65 % daging yang beredar di pasaran memenuhi standar SNI. Berdasarkan hasil kegiatan program Monitoring Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba yang dilakukan baik di Rumah Potong Hewan Unggas/Ruminansia (RPHR dan RPHU), ritel, distributor maupun di pasar modern dan tradisional serta di unit olahan dari 317 sampel yang diuji terhadap cemarkan mikroba dan residu antibiotik 43 sampel (13,5 %) tidak memenuhi standar atau 86,5 % memenuhi standar SNI. Terdapat kenaikan kualitas daging yang memenuhi standar SNI dimana pada tahun 2015 sebesar 71 % menjadi 83 % pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat/pelaku usaha di setiap mata rantai peredaran daging.

Untuk prosentase produk peternakan yang sesuai SNI telur dimana, target Renstra 65 % telur yang beredar di pasaran memenuhi standar SNI. Berdasarkan hasil kegiatan program Monitoring Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba yang dilakukan baik di farm, pasar tradisional maupun pasar modern serta di unit olahan telur dari 75 sampel yang diuji terhadap cemarkan mikroba dan residu antibiotik 13 sampel (17 %) tidak memenuhi standar atau 83 % memenuhi standar SNI. Kualitas telur yang memenuhi standar SNI pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 83 % atau tidak ada perbedaan. Perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada para peternak dan pelaku usaha untuk meningkatkan higiene sanitasi dan

perbaikan manajemen kesehatan hewan di farm sehingga residu antibiotik pada telur dapat ditekan/tidak ada.

Untuk prosentase produk peternakan yang sesuai SNI susu dimana target Renstra 52 % susu yang beredar di pasaran memenuhi standar SNI. Berdasarkan hasil kegiatan program Monitoring Surveilans Residu dan Cemarkan Mikroba yang dilakukan baik di farm, Tempat Pengumpulan Susu (TPS), Koperasi susu dan unit pengolahan susu dari 58 sampel yang diuji terhadap cemarkan mikroba dan residu antibiotik, 16 sampel (28 %) tidak memenuhi standar atau 72 % memenuhi standar SNI. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar unit usaha yang diambil sampelnya sudah memenuhi standar SNI. Terjadi penurunan kualitas susu yang memenuhi standar SNI dimana pada tahun 2015 sebesar 80 % menjadi 72 % pada tahun 2016. Perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada para peternak dan pelaku usaha untuk meningkatkan higiene sanitasi dan perbaikan manajemen kesehatan hewan di farm sehingga residu antibiotik pada susu dapat ditekan/tidak ada.

- Tercapainya target jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu. Disebabkan karena meningkatnya kualitas produk peternakan (daging, telur, susu) dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu dan adanya bantuan fasilitasi kemudahan proses administrasi.
- Jumlah pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional. Pada tahun 2016 pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional sebanyak 15 pelaku usaha atau terjadi kenaikan sebesar 200 % dari tahun 2015 sebesar 5 pelaku usaha. Hal ini dikarenakan Dinas Peternakan Jawa Barat telah memberikan fasilitas berupa sarana prasarana pada pasar ternak maupun pada unit pemasaran poktan/gapoktan sesuai usulan kabupaten/kota pada tahun sebelumnya sehingga realisasi jumlah pelaku melebihi target yang telah ditetapkan dan usulan tersebut melebihi usulan yang diminta pada tahun 2015.
- Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang memenuhi standar minimal dan SOP. Tahun 2016 realisasi jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang memenuhi standar minimal dan SOP berjumlah 5 unit sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menurun

bila dibanding dengan tahun 2015 sebesar 160 %. Oleh karena telah dialokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan terkait penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pasar ternak berjumlah 5 unit di kabupaten/kota.

- Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya. Realisasi terhadap target kelompok yang meningkatkan usahanya pada tahun 2016 mencapai 100%, apabila dibandingkan dengan realisasi terhadap target pada tahun 2015 tidak mengalami peningkatan. Target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 berjumlah 30 kelompok dengan realisasi sebesar 30 kelompok, yang terdiri dari pencapaian realisasi Bidang Pengembangan Usaha sebanyak 16 kelompok dan bidang prasarana dan sarana sebanyak 14 kelompok. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan dan pendampingan pada manajemen kelembagaan usaha peternakan, pengembangan status kelembagaan usaha peternakan serta pelaksanaan kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Manfaat yang diharapkan terdapatnya landasan bagi meningkatnya kepercayaan dunia usaha dan lembaga keuangan untuk membuka peluang kemitraan, kerjasama maupun kredit perbankan berdasarkan informasi penilaian oleh provinsi maupun oleh tingkat pusat sehingga peternak termotivasi untuk berkelompok. Selain itu, melalui pengembangan kawasan peternakan maka dibentuk kelompok usaha peternakan sebanyak 14 kelompok. Selain itu upaya dari bidang sarana dan prasarana dapat tercapainya peningkatan usaha kelompok terdiri dari peningkatan jenis usaha serta kapasitas tampung lokasi yang ada dikelompok tersebut.
- Presentase pelaku usaha yang berdaya saing. Pelaku usaha pengolahan hasil peternakan di Jawa Barat yang berdaya saing mengalami peningkatan sebesar 10 %. Peningkatan tersebut dikarenakan antara lain ada pendampingan penerapan jaminan mutu pengolahan hasil peternakan sebesar 5 unit kelompok/pelaku usaha, pembinaan peningkatan SDM pengolahan sebanyak 54 orang, fasilitasi kemasan sebanyak 25 kelompok/pelaku usaha dan fasilitasi sertifikasi sebanyak 5 kelompok/pelaku usaha. Target sasaran tersebut sebanyak 10 % dari 600 kelompok/pelaku usaha di Jawa Barat pada tahun 2016 sehingga realisasi target mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan.

- Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa; Jawa Barat dapat mempertahankan 0 (nol) kasus Anthrax pada hewan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Namun demikian mengingat sifat dari bakteri penyebab penyakit Anthrax yang dapat bertahan di alam selama berpuluh-puluh tahun maka pencegahan penyakit Anthrax harus tetap dilaksanakan secara terus-menerus.

Jumlah kasus positif Avian Influenza (AI) pada tahun 2016 adalah sebanyak 50 kasus, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 39 kasus positif, hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada tahun 2016 sehingga lingkungan menjadi basah, kondisi tersebut merupakan kondisi ideal untuk berkembang dan bertahan virus AI di lapangan, namun demikian tetap sesuai dengan target tahun 2016 yaitu tidak lebih dari 55 kasus positif Avian Influenza di Jawa Barat.

Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa; antara lain untuk kasus penyakit Brucellosis pada tahun 2015 dari hasil pengujian 11.143 sampel terdapat positif CFT/Elisa dengan prevalensi 2,35% sedangkan pada tahun 2016 pengujian skrining brucellosis dilaksanakan melalui pengujian serum darah sebanyak 12.633 sampel. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 265 sampel menunjukkan hasil positif (reaktor brucellosis) berdasarkan pengujian CFT/ELISA. (2,10%). Pengujian positif CFT/ELISA tersebut meliputi 3 (tiga) ekor dari Kab. Tasikmalaya, 11 (sebelas) ekor dari Kab. Cianjur, 4 (empat) ekor dari kabupaten Ciamis, 133 (seratus tiga puluh tiga) ekor dari Kabupaten Bandung Barat, 12 (dua belas) ekor dari Kabupaten Bandung, 40 (empat puluh) ekor Kab. Bogor, 1 (satu) ekor Kota Depok, 9 (sembilan) ekor Kab. Garut, 29 (dua puluh sembilan) ekor Kota Bogor, 7 (tujuh) ekor Kab. Cirebon, 6 (enam) ekor Kab. Sukabumi, 7 (tujuh) ekor Kab. Indramayu dan 3 (tiga) ekor Kab. Subang.

Tidak tercapainya target 0 kasus Rabies dengan terjadinya 2 kasus positif rabies hewan anjing pada tahun 2016 di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian rabies belum berjalan optimal, diharapkan pada tahun 2017 kegiatan vaksinasi lebih ditingkatkan lagi.

Prinsip pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan yang menjadi tugas pemerintah terutama diarahkan pada penyakit yang berdampak kerugian ekonomi tinggi, penyebaran cepat serta mengakibatkan

angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4026/Kpts./OT.140/4/2013 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis terdapat 22 (dua puluh dua) PHMS. Dari 22 PHMS tersebut, hanya 4 PHMS yang menjadi prioritas pengendalian di Jawa Barat yaitu AI, rabies, anthrax dan *brucellosis* :

➤ Pengendalian Penyakit AI pada unggas :

- Tahun 2012 terjadi kenaikan kasus AI karena munculnya wabah AI pada itik . Kasus positif AI ditemukan sebanyak 76 kasus yang tersebar di 16 kab/kota meliputi 58 kecamatan dan 72 desa dengan jumlah kematian unggas sebanyak 6.493 ekor terdiri dari ayam buras 2.699 ekor dan itik/entog sebanyak 3.789 ekor.
- Tahun 2013 terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan tahun 2012 menjadi 73 kasus, namun terjadi kenaikan jumlah unggas yang mati akibat AI menjadi 17.286 ekor.
- Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kasus menjadi 74 kasus dengan kematian sebanyak 19.692 ekor namun terjadi penurunan jumlah daerah tertular di 15 Kabupaten, 46 Kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan (termasuk dalam kategori sedang dengan kasus 50-100 kasus).
- Tahun 2015, terjadi menurunnya kasus penyakit avian influenza menjadi 33 kasus dibanding tahun sebelumnya.
- Tahun 2016, terjadi kenaikan kasus penyakit avian influenza menjadi 50 kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 33 kasus.

➤ Pemberantasan Penyakit Rabies :

- Pada Tahun 2012 kembali ditemukan 1 kasus positif Rabies pada anjing dengan korban gigitan yang tersebar di Desa Purbayani Kec. Caringin dan Desa Sinarjaya Kec. Bungbulang
- Pada bulan April Tahun 2013 ditemukan 1 kasus positif Rabies pada hewan kucing di Kabupaten Bandung.
- Tahun 2014 tidak terjadi kasus positif rabies (0 kasus).
- Tahun 2015 terjadi kasus positif 2 (dua) kasus rabies.
- Tahun 2016 terjadi kasus positif 2 (dua) kasus rabies.

➤ Pencegahan Penyakit *Anthrax* :

- Pencegahan anthrax dilaksanakan melalui sosialisasi, pengawasan lalulintas hewan dan vaksinasi di daerah endemis anthrax yaitu

Kabupaten Bogor, Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang serta Kota Bogor dan Depok. Pada Tahun 2008 terjadi 1 kasus positif *Anthrax* pada ternak sapi perah di Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 tidak terjadi kasus positif anthrax pada hewan.

➤ Pengendalian Penyakit Brucellosis :

- Pada tahun 2012 dari 6.633 spesimen darah yang diuji diperoleh hasil reaktor Brucellosis sebanyak 66 ekor.
- Pada tahun 2013 terjadi kenaikan prevalensi penyakit brucellosis menjadi 4,24% pada tahun 2013.
- Pada tahun 2014 dari hasil pengujian 4.943 sampel terdapat positif CFT/Elisa dengan prevalensi 2,1 %.
- Pada Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa; antara lain untuk kasus penyakit Brucellosis pada tahun 2014 dari hasil pengujian 4.943 sampel terdapat positif CFT/Elisa dengan prevalensi 2,1% sedangkan pada tahun 2015 pengujian skrining brucellosis dilaksanakan melalui pengujian serum darah sebanyak 11.143 sampel. Berdasarkan hasil skrining diketahui bahwa dari 11.143 sampel yang diuji 348 sampel positif terhadap pengujian RBT dan 262 sampel menunjukkan hasil positif (reaktor brucellosis) berdasarkan pengujian CFT/ELISA. Pengujian positif CFT/ELISA tersebut meliputi 3 (tiga) ekor dari Kota Bekasi, 20 (dua puluh) ekor dari Kab. Cianjur, 39 (tiga puluh enam) ekor dari kabupaten Bandung Barat dan 43 (tiga puluh tiga) ekor dari Kabupaten Bandung, 75 (tujuh puluh lima) ekor Kab. Bogor dan 20 (dua puluh) ekor Kota Depok, 2 (dua) ekor Kota Cirebon, 4 (empat) ekor Kab. Majalengka, 11 (sebelas) ekor Kota Bogor, 3 (tiga) ekor Kota Tasikmalaya, 4 (empat) ekor Kab. Sumedang, 18 (delapan belas) ekor Kab. Sukabumi, 1 (satu) ekor Indramayu, 11 (sebelas) ekor kota Sukabumi, 3 (tiga) ekor kab Bekasi dan 3 (tiga) ekor Kota Cimahi. Adapun tindak lanjut terhadap 262 ekor reaktor positif sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dimana sampel positif berasal.
- Tahun 2016 pengujian skrining *brucellosis* dilaksanakan melalui pengujian serum darah sebanyak 12.633 sampel. Berdasarkan hasil

pengujian diketahui bahwa 265 sampel menunjukkan hasil positif (reaktor brucellosis) berdasarkan pengujian CFT/ELISA. (2,10%). Pengujian positif CFT/ELISA tersebut meliputi 3 (tiga) ekor dari Kab. Tasikmalaya, 11 (sebelas) ekor dari Kab. Cianjur, 4 (empat) ekor dari kabupaten Ciamis, 133 (seratus tiga puluh tiga) ekor dari Kabupaten Bandung Barat, 12 (dua belas) ekor dari Kabupaten Bandung, 40 (empat puluh) ekor Kab. Bogor, 1 (satu) ekor Kota Depok, 9 (sembilan) ekor Kab. Garut, 29 (dua puluh sembilan) ekor Kota Bogor, 7 (tujuh) ekor Kab. Cirebon, 6 (enam) ekor Kab. Sukabumi, 7 (tujuh) ekor Kab. Indramayu dan 3 (tiga) ekor Kab. Subang.

3.1.4. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Selain capaian sasaran diatas, terdapat juga sasaran umum Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

(1) Peningkatan Produksi Pertanian

Total anggaran program kegiatan produksi pertanian sebesar Rp. 29.684.542.985,- dengan penyerapan sebesar Rp. 28.373.414.438 atau 95,58 %. Kegiatan yang mendukung terhadap peningkatan produksi daging sebanyak 4 kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.954.040.000,- yaitu 1) Pengembangan Usaha Integrasi Sentra pengembalaan Sapi Potong dan Domba di Jawa Barat Rp. 415.000.000, 2) Pengujian di BPPT Sapi Potong Ciamis Rp. 512.920.000, 3) Konservasi dan Pengembangan Sapi Pasundan di BPPT Sapi Potong Ciamis Rp. 598.620.000,-, 4) Pemberdayaan Peternak melalui Magang Budidaya Ternak Domba di UPTD BPPT Domba Margawati Rp. 427.500.000,-. Capaian realisasi produksi daging sebanyak 992.770 ton tidak seluruhnya dari hasil kegiatan tersebut. Sebagian besar merupakan pengaruh hasil lainnya dari dampak anggaran kegiatan peningkatan populasi ternak, APBN, APBD kabupaten/kota, swasta dan juga hasil dari kegiatan tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang mendukung produksi telur sebesar Rp. 967.500.000,- dari kegiatan Pengembangan UPTD BPPT Unggas Jatiwangi Sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Ternak Unggas Berkualitas. Kegiatan tersebut untuk menunjang sebagian kecil dari peningkatan produksi telur. Oleh karena produksi telur sudah banyak disumbang dari

pihak swasta pada ayam ras petelur, dimana di Jawa Barat terdapat banyak peedloter maupun peternak ayam ras yang memproduksi tinggi, sehingga di Jawa Barat cukup melimpah. Produksi telur juga disumbang oleh ayam bukan ras (ayam kampung) dari para peternak maupun masyarakat sekitarnya.

Produksi susu didukung oleh dua kegiatan utama dari Program Peningkatan Produksi Pertanian dengan jumlah anggarn Rp. 4.045.304.825,- yaitu 1) kegiatan Pengembangan UPTD BPTSP dan HMT sebagai pusat pengembangan teknologi sapi perah dan hijauan makanan ternak berkualitas, 2) Penyediaan Pakan dan Kebutuhan Dasar Lainnya di BPT Sapi Perah & Hmt Cikole Lembang. Dukungan ini di dorong juga dari kegiatan di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih. Produksi susu banyak di sumbang dari produksi susu peternak-yang tergabung kedalam koperasi susu dan sebagian dari kelompok-kelompok peternak kecil.

Program dan kegiatan yang mendukung kepada populasi ternak adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian dengan 18 (delapan belas) kegiatan dengan total sebesar Rp. 18.821.153.660 yaitu A. Sapi Potong : 1) Pengembangan Perbibitan Ternak Rp. 407.317.500,- 2) Updating Petugas IB Jawa Barat Rp. 304.577.900,- 3) Pengembangan di UPTD BPPT Sapi Potong Ciamis Rp. 1.034.879.000,-, 4) Penyediaan Pakan dan Kebutuhan Dasar lainnya di UPTD BPPT Sapi Potong Ciamis Rp. 2.267.956.000,-. Sapi perah : 1) Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah di BPPIB-TSP Bunikasih Rp. 425.940.000,- 2) Penyediaan Pakan dan Kebutuhan Dasar Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPTD BPPIBTSP Bunikasih Rp. 4.026.811.010,- 3) Pengujian Bibit Dan Hasil Teknologi Pembibitan Di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Perah Bunikasih Rp. 123.500.000,- 4) Peningkatan Mutu Sapi Perah ke Belanda Rp. 603.726.500,-. Kerbau meliputi kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp. 580.000.000,-.

Kegiatan peningkatan populasi ternak Domba sebesar Rp. 4.028.890.250 dengan kegiatan 1) Pembibitan Domba di Sentra Peternakan Rakyat (3 Kabupaten) Rp. 632.930.250,-, 2) Diseminasi Teknologi Peternakan dan Pembinaan Kelompok Ternak Domba Rp. 226.500.000,-, 3) Penyediaan Pakan Ternak dan Kebutuhan Dasar Budidaya Ternak Domba lainnya di UPTD BPPT Domba Margawati dan SUPPTD Bunihayu Rp. 3.169.460.000,-.

Kambing : 1) Pengujian dan Peningkatan Performance Ternak Domba di UPTD BPPT Domba Margawati dan SUPPTD Bunihayu Rp. 497.100.000,- 2) Aplikasi Teknologi Prosesing Pengawetan Hijauan Pakan Ternak dan Kompos Rp. 240.350.000,-.

Kegiatan yang mendukung populasi ternak ayam ras dan buras petelur adalah Kegiatan Pengujian Mutu Pakan Secara Laboratories di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole – Lembang Rp. 393.300.000,-. Pedaging ; Kegiatan Pengembangan Budidaya Peternakan sebesar Rp 900.000.000,- . Ayam buras : kegiatan Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat Rp. 700.000.000,- dan Itik ; Kegiatan Penyediaan Pakan Ternak Unggas di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi sebesar Rp. 2.286.805.500,-.

Sasaran meningkatnya kinerja kelembagaan peternakan dengan indikator jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya di dukung oleh Kegiatan Penguatan Kelembagaan Peternakan sebesar Rp. 834.000.000,- dan Bimbingan Teknologi Demonstrasi Farm sebesar Rp. 575.050.000,- dengan masing-masing penyerapan 91,26 % dan 90,26 %.

Kegiatan yang mendukung indikator kinerja jumlah kawasan usaha peternakan dengan total anggaran Rp. 2.487.494.500,- dari 5 (lima) kegiatan yaitu 1) Pembibitan Sapi Perah Di Sentra Peternakan Rakyat Di Tujuh Kabupaten sebesar Rp. 887.715.500,- penyerapan 92,90 % 2) GCB-Penataan Kawasan Peternakan di Hulu DAS Citarum sebesar Rp. 660.175.000,- penyerapan 60,65 %, 3) Pengembangan Kawasan Peternakan di Jawa Barat sebesar Rp. 806.904.000,- penyerapan 91,62 %, 4) CLTH-Kegiatan Sekolah Lapang Teknologi Budidaya Sapi Pasundan di Sekitar Kawasan Geopark Ciletuh Rp. 88.050.000,- penyerapan 94,95 %, 5) CLTH-Kajian Konservasi Sapi Pasundan di Kawasan Geopark Ciletuh Rp. 44.650.000,- penyerapan 98,85 %

(2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian yang mendukung terhadap jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya sebesar Rp. 2.194.886.000,- penyerapan 97,79 % adalah 1) Kegiatan Pelatihan Teknis Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang Rp. 1.391.786.000,- penyerapan 98,09 %, 2) Kegiatan Perencanaan Program Pelatihan Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang Rp. 236.100.000,- penyerapan 99,40

% dan 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas WUB Bidang Peternakan sebesar Rp. 567.000.000,- penyerapan 96,39 %.

(3) Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan dengan indikator prosentase produk peternakan yang sesuai SNI (%) daging, telur dan susu adalah kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp. 601.430.000,- dengan penyerapan Rp. 557.348.050 atau 92,67 %.

Kegiatan ini mendukung juga, untuk capaian indikator kinerja jumlah unit usaha yang mendapat sertifikasi/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu. Sebagian dukungan lainnya adalah kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Jawa Barat sebesar Rp. 900.000.000,- dengan penyerapan 95,73 %. Hasil target yang dicapai dari indikator ini sebesar 100 %.

Capaian indikator jumlah unit usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional dari target 5 buah dengan realisasi 15 buah menunjukkan capaian sangat baik di dukung oleh Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan kegiatan Kerjasama di Wilayah Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat sebesar Rp. 45.000.000,- penyerapan 100 %.

Sementara indikator kinerja jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota dengan target 5 unit dan tercapai 5 unit tersebut dari Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pemasaran Hasil Peternakan sebesar Rp. 1.728.387.500,- dengan penyerapan 93,52 %. Kegiatan ini meliputi penyediaan sarana pemasaran di kab/kota dalam bentuk konstruksi maupun rehabilitasi.

Sasaran meningkatkan kinerja kelembagaan peternakan dengan indikator kinerja prosentase pelaku usaha yang berdaya saing didukung oleh kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Jawa Barat dengan total anggaran Rp. 900.000.000,- dengan penyerapan 95,73 %.

(3) Pengendalian Penyakit Hewan Menular

Pengendalian penyakit hewan menular dilakukan oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan dengan anggaran Rp 4.784.604.000 ,- dengan penyerapan Rp 4.603.300.592 atau 96,21% dari 5 (lima) kegiatan yaitu 1) Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan anggaran Rp. 705.000.000,-, 2) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan anggaran Rp. 1.609.804.000,- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Hewan Cikole anggaran Rp. 1.215.000.000, 4) Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan, Obat Hewan dan Pangan Asal Hewan di BP3HK Cikole Lembang anggaran Rp.1.117.800.000,- dan 5) Pengendalian Penyakit Ternak Domba di UPTD BPPTD Margawati Garut anggaran Rp. 137.000.000,-.

Program ini sangat mendukung terhadap indikator kinerja jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa yaitu Anthrax (kasus/tahun), Rabies (kasus/tahun), AI (kasus/tahun) dan Brucellosis (prevalensi %). Sasaran dari indikator kinerja tersebut adalah terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa di daerah wilayah Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak dengan baik. Semua indikator kinerja tercapai kecuali penyakit rabies dari target 0 terdapat 2 kasus dan secara keseluruhan penyakit hewan menular strategis dan zoonosa tercapai dengan sangat baik.

a. Pencapaian PADS Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008, tentang Retribusi Jasa Pengujian Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan. Sehingga pada tahun 2009 sumber PADS Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berasal dari hasil penjualan bibit dan produk peternakan sebagai penggantian biaya produksi di UPTD, serta dari Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Pengujian dan penyidikan.

Adapun target PADS Dinas Peternakan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.800.575.000,-, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 telah menghasilkan realisasi PADS sebesar Rp. 4.837.014.275,- (127,27%). Rincian pencapaian PADS dari masing- masing UPTD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Pencapaian PADS Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Uraian	2016			% realisasi 2015	% kenaikan 2015-2016
	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Retribusi Daerah					
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
1 UPTD. BP3HK Cikole Lembang-KBB	457.000.000	542.850.050	118,79	157,91	-39,12
2 UPTD. BPMPT Cikole Lembang-KBB	41.000.000	11.220.000	27,37	112,18	-84,81
J U M L A H I	498.000.000	554.070.050	111,26	154,40	-43,14
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah					
1 UPTD. BPTSP & HMT Cikole-Lembng	1.250.000.000	1.963.108.800	157,05	100,09	56,96
2 UPTD. BPPIB TSP Bunikasih-Cianjur	730.000.000	826.544.525	113,23	100,01	13,22
3 UPTD BPPT Unggas Jatiwangi-Majalengka	430.000.000	596.078.900	138,62	154,44	-15,82
4 UPTD BPPT Sapi Potong Ciamis	442.575.000	443.145.000	100,13	93,88	6,25
5 UPTD BPPT Domba Margawati -Garut	450.000.000	454.067.000	100,90	100,05	0,85
J U M L A H II	3.302.575.000	4.282.944.225	129,68	105,54	24,14
JUMLAH I + JUMLAH II	3.800.575.000	4.837.014.275	127,27	111,76	15,51

Pendapatan asli daerah tahun 2016 terjadi kenaikan dibanding tahun 2015 sebesar 15,51 %. Kenaikan tertinggi diperoleh dari UPTD. BPTSP & HMT Cikole-Lembng sebesar 56,96 % sedangkan penurunan terbanyak diperoleh dari UPTD. BPMPT Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disebabkan gedung kantor dan laboratorium UPTD. BPMPT Cikole Lembang sedang di rehabilitasi sehingga aktivitas kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal.

b. Pencapaian PDRB Peternakan

Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta) 2013-2015

No.	Lapangan Usaha	Dalam Juta (Rp)		2015**
		2013	2014*	
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	114.042.321,7	121.165.396,1	132.872.442,3
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	101.806.816,4	107.239.691,2	117.214.395,0
	a. Tanaman pangan	56.493.689,9	58.049.336,7	64.258.961,8
	b. Tanaman hortikultura	20.115.838,6	22.401.812,6	23.951.773,2
	c. Tanaman perkebunan	10.107.649,1	10.176.206,7	10.247.337,0
	d. Peternakan	13.344.393,6	14.774.347,9	16.747.378,7
	e. Jasa pertanian dan perburuan	1.745.245,3	1.837.987,3	2.008.944,3
2.	Kehutanan	1.112.775,7	1.165.100,6	1.242.600,2

3.	Perikanan	11.122.729,6	12.760.604,2	14.415.447,1
----	-----------	--------------	--------------	--------------

Sumber : BPS Jawa Barat (2016)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Nilai PDRB bidang peternakan dari tahun 2013-2015 cukup tinggi di bawah bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan rata-rata Rp. 14.955.373,40 dan mengalami peningkatan rata-rata tiap tahun sekitar Rp. 1.701.492,55

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan Bidang Peternakan dengan Lapangan Usaha Tahun 2014-2015.

No.	Lapangan Usaha	Presentase	
		2014*	2015**
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,58	0,12
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	(0,23)	(0,68)
	f. Tanaman pangan	(1,59)	(3,82)
	g. Tanaman hortikultura	1,87	3,86
	h. Tanaman perkebunan	(3,43)	(0,62)
	i. Peternakan	4,18	3,97
	j. Jasa pertanian dan perburuan	0,95	0,68
2.	Kehutanan	(1,96)	(1,36)
3.	Perikanan	8,09	6,85

Sumber : BPS Jawa Barat (2016)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi PDRB tahun 2014 – 2015 sektor pertanian dari bidang peternakan cukup tinggi dibanding sektor lain kecuali dari bidang perikanan. Hasil ini menunjukkan bidang peternakan penyumbang cukup besar terhadap keberhasilan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan peternakan terhadap lingkup pertanian. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi PDRB di Bidang Perkebunan cukup menurun dengan minus sekitar sekitar -3,43 dan -0,62 % dan kurang dalam upaya mendukung RPJMD Provinsi Jawa Barat.

c. Pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks harga yang diterima dan dibayar petani serta nilai tukar petani di Jawa Barat tahun 2015

No	Bulan	Indeksi diterima petani	Indeks dibayar petani	NTP
----	-------	----------------------------	--------------------------	-----

No	Bulan	Indeksi diterima petani	Indeks dibayar petani	NTP
1	Januari	125,54	118,48	105,95
2	Pebruari	125,27	118,53	105,69
3	Maret	125,66	119,17	105,45
4	April	122,50	119,19	102,78
5	Mei	122,78	119,80	102,48
6	Juni	124,34	120,63	103,08
7	Juli	126,68	121,61	104,17
8	Agustus	127,38	122,36	104,11
9	September	129,41	122,14	105,95
10	Oktober	130,35	122,06	106,80
11	Nopember	131,25	122,43	107,20
12	Desember	132,42	123,47	107,24
Rata-rata		126,97	120,82	105,08

Sumber : BPS Jawa Barat (2016)

NTP Subsektor Peternakan Desember 2015 berada pada posisi 111,83 dan tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,75 persen dibandingkan NTP November 2015 yang memiliki indeks sebesar 110,99. Indeks Diterima Petani (IT) naik sebesar 1,35 persen lebih tinggi dari kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (IB) yang naik 0,60 persen. Bila dirinci per subkelompok, IT Subkelompok Ternak Kecil naik 2,07persen, IT Subkelompok Unggas naik 1,69 persen, IT Subkelompok Ternak Besar naik 1,25 persen, dan IT Subkelompok Hasil Ternak naik 0,34 persen. Di sisi pengeluaran petani, Indeks Dibayar Petani (IB) mengalami kenaikan 0,60 persen akibat IB Konsumsi Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 1,21 persen demikian juga IB Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal inflasi 0,09 persen.

Diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105,08 artinya output yang diterima oleh peternak lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh karena lebih besar dari nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NTP cukup baik untuk sektor pertanian dalam menunjang target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

3.2. Akuntabilitas Anggaran

Berdasarkan ketetapan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu azas dari penyelenggaraan Negara adalah azas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3.2.1. Pengelolaan Dana APBD

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Peternakan di Jawa Barat, Dinas Peternakan untuk tahun 2016 memperoleh anggaran DPA yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 80.361.575.770,- (murni), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016 berdasarkan DPPA tahun 2016, anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Rp. 77.005.760.086,- (perubahan) sampai dengan 31 Desember 2016, pencapaian fisik 99,34%, dan keuangan sebesar Rp. 73.156.348.751,- (95,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.849.411.335 merupakan hasil efisiensi kegiatan.

Sedangkan untuk rincian pencapaian prosentase realiasi fisik dan keuangan dari masing-masing Belanja/Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Pencapaian Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja/Kegiatan APBD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	SPJ		FISIK (%)
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	129.000.000	116.450.500	90,27	90,27
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	448.500.000	448.459.000	99,99	100,00
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1.110.669.000	944.531.300	85,04	94,95
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.193.376.774	4.779.814.276	92,04	99,99
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.593.106.127	22.275.955.071	94,42	100,00
6	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.904.257.700	5.716.600.245	96,82	98,48
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	238.000.000	235.108.500	98,79	100,00

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	SPJ		FISIK (%)
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6
8	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	450.000.000	435.869.020	96,86	100,00
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian	29.684.542.985	28.373.414.438	95,58	99,02
10	Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	2.194.886.000	2.146.487.178	97,79	98,79
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	4.784.604.000	4.603.300.592	96,21	99,40
12	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	3.274.817.500	3.080.358.631	94,06	99,94
TOTAL BELANJA LANGSUNG		77.005.760.086	73.156.348.751	95,00	99,34

3.2.2. Pengelolaan Dana APBN

Selain mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat juga ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola kegiatan APBN melalui DIPA yang berasal dari Kementerian Pertanian untuk alokasi anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dari Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Adapun pagu alokasi anggaran APBN secara keseluruhan Tahun 2016 tersebut sebesar Rp. 52.401.630.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 44.320.031.612,- (84,58 %) dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lingkup Peternakan dan Kesehatan secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 Per Kegiatan Utama.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	6.720.020.000	6.247.696.287	92,97
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	3.772.575.000	3.180.647.390	84,31
3	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	32.485.211.000	26.451.270.414	81,43
4	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1.887.994.000	1.364.013.775	72,25
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	1.927.970.000	1.863.497.571	96,66
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	5.607.860.000	5.212.906.175	92,96
	Jumlah	52.401.630.000	44.320.031.612	84,58

Berdasarkan fungsinya pada tahun 2016 total jumlah APBN terbesar dialokasikan untuk melaksanakan fungsi Penyediaan Benih dan Bibit dengan jumlah anggaran Rp. 32.485.211.000,- sedangkan yang terkecil adalah pada fungsi Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan anggaran sebesar Rp. 1.887.994.000,-.

Tabel 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Per Kegiatan Utama.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan produksi pakan ternak	2.999.820.000	2.635.811.606	87,87
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	3.772.575.000	3.180.647.390	84,31
3	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	7.159.620.000	5.207.455.235	72,73
4	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1.537.994.000	1.016.318.200	66,08
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	1.038.856.000	1.001.312.499	96,39
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1.999.540.000	1.767.090.300	88,37
7.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	30.000.000	27.023.000	90,08
8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	344.500.000	288.432.795	83,73
9	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	35.600.000	33.146.715	93,11
	Jumlah	18.918.505.000	15.157.237.740	80,12

Tabel 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 s/d Tahun 2015

No	Kewenangan	Tahun (ribu)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Dekonsentrasi	11.985.347	11.344.891	9.384.805	13.939.354	10.589.686.000
2	Tugas Pembantuan Provinsi	81.721.000	29.849.194	12.415.651	26.856.990	7.918.719.000
3	Tugas Pembantuan Kabupaten	8.300.000	42.141.831	29.458.662	48.303.885	33.893.225.000
	Jumlah	102.006.347	83.335.916	51.259.118	89.100.229	52.401.630.000
	Perbandingan Provinsi dan Kabupaten	12 : 88	14 : 86	18 : 82	16 : 84	35 : 65

Tabel 14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan populasi ternak	Jumlah Produksi ternak :			
		• Daging	129,18	97,77	2,23
		• Telur	116,79	99,06	0,94
		• Susu	131,10	99,75	0,25
		Jumlah Populasi ternak :			
		• Sapi Potong	88,62	94,24	5,76
		• Sapi Perah	82,02	96,70	3,3
		• Kerbau	72,82	93,43	6,57
		• Domba	80,74	98,49	1,51
		• Kambing	49,07	96,46	3,54
		• Ayam Ras Petelur	132,46	87,54	12,46
		• Ayam Ras Pedaging	81,03	87,71	12,29
		• Ayam Buras	88,46	95,22	4,78
		• Itik	104,55	44,48	55,52
2	Meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan	Prosentase produk peternakan yang sesuai SNI			
		• Daging	133,85	92,67	7,33
		• Telur	127,69	sda	sda
		• Susu	138,46	sda	sda
		Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu	111,54	95,73	4,27
3	Meningkatnya aksesibilitas pasar hasil peternakan	Jumlah Pelaku usaha yang mengakses pasar regional dan nasional	300	100,00	0
		Jumlah sarana pemasaran peternakan di Kab/Kota yang mematuhi standar minimal dan SOP	200	93,52	6,48
4	Meningkatnya kinerja sumberdaya dan kelembagaan peternakan	Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya	100	95,08	4,92
5	Meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis	Prosentase pelaku usaha yang berdaya saing	100	95,73	4,27
6	Terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan	Jumlah kawasan usaha peternakan	100	84,11	15,89
7	Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa	Jumlah kasus hewan menular strategis dan zoonosa			
		• Anthrax	100,00	54,42	45,58
		• Rabies	92,59	79,40	20,6
		• AI	110,00	32,48	67,52

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
		• Brucellosis	142,86	65,24	34,76

Sesuai dengan Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya, terlihat bahwa dari seluruh sasaran stratejik dan indikator kinerja yang ditetapkan maka terdapat 7 (tujuh) sasaran stratejik dan 9 (sembilan) indikator kinerja kecuali untuk indikator kinerja : Jumlah Produksi Yang Dihasilkan (Daging, Telur, Susu) yang capaiannya diatas 100 persen.

Tingkat efisiensi terendah dari persentase penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan yang mendukung sasaran stratejik dan indikator kinerja tersebut diatas adalah untuk sasaran stratejik "Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa" dengan indikator kinerja "Jumlah Kasus Penyakit Brucellosis" sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan tingkat efisiensi tertinggi dari persentase penyerapan anggaran terdapat pada kegiatan yang mendukung sasaran stratejik "Terfasilitasinya Kawasan Usaha Peternakan yang Berwawasan Lingkungan" dengan indikator kinerja "Jumlah Kawasan Usaha Peternakan" sebesar 29,87. Hal ini karena adanya pengembalian anggaran pada kegiatan penggantian kompensasi lahan dari PTPN VIII yang berkenaan dengan pembangunan kandang komunal di DAS Citarum.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

- a) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Visinya "Menjadi Akselerator Peningkatan Produksi Peternakan yang Berdaya Saing dan Aman Dikonsumsi Masyarakat Jawa Barat Tahun 2018" melalui 3 Misi, 7 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja diperoleh rata-rata capaian untuk OPD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai kinerja **SANGAT BAIK (114,50%)**, yang diperoleh dari rata-rata capaian 3 Misi. Rata-rata capaian untuk Misi Pertama (Memfasilitasi peningkatan produktivitas ternak dan daya saing produk peternakan di Jawa Barat) mempunyai kinerja **SANGAT BAIK (132,15%)**, Misi Kedua (Memfasilitasi usaha peternakan yang berwawasan lingkungan di Jawa Barat) mempunyai kinerja **BAIK (100,00%)**, dan Misi Ketiga (Mewujudkan lingkungan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang kondusif di Jawa Barat) mempunyai kinerja **SANGAT BAIK (111,36%)**.
- b) Misi Pertama mempunyai nilai **SANGAT BAIK**, capaian tersebut diperoleh dari 4 Sasaran Strategiknya; dimana terdapat 3 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja **SANGAT BAIK** yaitu untuk Sasaran Strategik : meningkatnya produksi dan populasi ternak, meningkatnya kualitas dan keamanan produk, dan meningkatnya aksesibilitas pasar hasil peternakan. Sedangkan meningkatnya kinerja sumberdaya dan kelembagaan peternakan masing-masing mempunyai rata-rata capaian kinerja yang **BAIK**.
- c) Misi Kedua mempunyai nilai **BAIK**, capaian tersebut diperoleh dari 2 sasaran strategiknya; dimana dari 2 sasaran tersebut diperoleh rata-rata capaian kinerja **BAIK** yaitu dengan sasaran strategik : meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis, dan sasaran strategik : terfasilitasinya kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan.
- d) Misi Ketiga mempunyai nilai **SANGAT BAIK**, capaian tersebut diperoleh dari sasaran strategik : terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa; dimana dari sasaran tersebut diperoleh rata-rata capaian kinerja **SANGAT BAIK**.
- e) Dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang peternakan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya mendapat alokasi anggaran DPA (APBD) sebesar Rp. 80.361.575.770,- kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016 berdasarkan DPPA tahun

2016, anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Rp. 77.005.760.086,- (perubahan) sampai dengan 31 Desember 2016, pencapaian fisik 99,34%, dan keuangan sebesar Rp. 73.156.348.751,- (95,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.849.411.335 merupakan hasil efisiensi kegiatan.

- f) Sementara alokasi anggaran APBN Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 18.918.505.000,- yang meliputi alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. **10.999.786.000,-** dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. **7.918.719.000,-**. Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi pelaksanaan anggaran untuk penyerapan keuangan realisasi Dekonsentrasi sebesar Rp. **8.953.764.828,-** atau tercapai **81,40 %**, sedangkan realisasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. **6.203.472.912,-** atau tercapai **78,34 %**,-.
- g) Sumberdaya dan kelembagaan peternakan, berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas upaya pembangunan urusan bidang peternakan pada tahun 2016 adalah dengan diraihnya penghargaan APN diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Badan Ketahanan Pangan, setiap tahunnya melaksanakan Apresiasi kinerja Kelembagaan untuk semua eselon I dilingkup Kementerian Pertanian RI, melalui kegiatan Adikarya Pangan Nusantara. Adapun prestasi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat pada Bidang Peternakan di Tingkat Nasional Tahun 2016 adalah Prestasi kelompok Agribisnis “AS-SALAM” Kampung Salamnunggal RT 02 RW 08 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan Adikarya Pangan Nusantara 2016 untuk katagori “ Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan” dan penghargaan tersebut disampaikan oleh Presiden RI di Istana Merdeka.
- h) Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 telah mendorong masyarakat dan swasta di Jawa Barat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :
- Pencapaian Sasaran pembangunan peternakan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang mendukung RPJMD provinsi Jawa Barat dengan sasaran utama pada misi 2 dan janji gubernur yaitu sasaran 3 (tiga) meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi dengan indikator kinerja daerah yaitu PDRB per kapita ADHB, sasaran 2 (dua) meningkatnya daya saing usaha pertanian dengan indikator kinerja daerah yaitu sertifikasi jaminan mutu pelaku usaha produk pertanian dan nilai tukar petani. Implemtasi tersebut, dicapai dari ANGKA SEMENTARA** keberhasilan tahun 2016 pada sasaran stratejik dengan

meningkatnya produksi dan populasi ternak dengan indikator kinerja produksi daging sebanyak 992.770 ton, produksi susu sebanyak 352.390 ton, produksi Telur sebanyak 253.712 ton, untuk populasi yang merupakan renstra OPD yaitu sapi potong 413.211 ekor, sapi perah 117.927 ekor, kerbau 104.565 ekor, domba 9.919.376 ekor, kambing 1.215.576 ekor, ayam ras petelur 18.465.744 ekor, ayam ras pedaging per periode 106.848.293 ekor, ayam buras 25.599.993 ekor dan itik 10.672.292 ekor.

- Untuk capaian indikator kinerja lainnya yang mendukung indikator Kinerja daerah pada RPJMD provinsi pada sasaran strategik dengan meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan adalah jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu berjumlah 58 unit. Capaian indikator kinerja sasaran strategik pada terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa dengan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa yaitu Anthrax 0 kasus, Avian Influenza (AI) ada 50 kasus, Brucellosis 2,10 % prevalensi dan Rabies terjadi 2 kasus.
- Walaupun kegiatan sosialisasi serta cakupan vaksinasi AI pada unggas, vaksinasi rabies pada HPR, vaksinasianthrax pada ternak ruminansia, vaksinasi brucellosis pada ternak sapi perah dan eliminasi anjing liar/diliarkan belum optimal namun pengendalian PHMS di Jawa Barat tahun 2016 telah memperlihatkan hasil sebagai berikut :
 - Jawa Barat dapat mempertahankan 0 (nol) kasus Anthrax pada hewan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Namun demikian mengingat sifat dari bakteri penyebab penyakit Anthrax yang dapat bertahan di alam selama berpuluh-puluh tahun maka pencegahan penyakit Anthrax harus tetap dilaksanakan secara terus-menerus.
 - Jumlah kasus positif Avian Influenza (AI) pada tahun 2016 adalah sebanyak 50 kasus, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 39 kasus positif, hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada tahun 2016 sehingga lingkungan menjadi basah, kondisi tersebut merupakan kondisi ideal untuk berkembang dan bertahannya virus AI di lapangan, namun demikian tetap sesuai dengan target tahun 2016 yaitu tidak lebih dari 55 kasus positif Avian Influenza di Jawa Barat.
 - Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa; antara lain untuk kasus penyakit Brucellosis pada tahun 2015 dari hasil pengujian 11.143 sampel terdapat positif CFT/Elisa dengan prevalensi 2,35%

sedangkan pada tahun 2016 pengujian skrining brucellosis dilaksanakan melalui pengujian serum darah sebanyak 12.633 sampel. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 265 sampel menunjukkan hasil positif (reaktor brucellosis) berdasarkan pengujian CFT/ELISA. (2,10%). Pengujian positif CFT/ELISA tersebut meliputi 3 (tiga) ekor dari Kab. Tasikmalaya, 11 (sebelas) ekor dari Kab. Cianjur, 4 (empat) ekor dari kabupaten Ciamis, 133 (seratus tiga puluh tiga) ekor dari Kabupaten Bandung Barat, 12 (dua belas) ekor dari Kabupaten Bandung, 40 (empat puluh) ekor Kab. Bogor, 1 (satu) ekor Kota Depok, 9 (sembilan) ekor Kab. Garut, 29 (dua puluh sembilan) ekor Kota Bogor, 7 (tujuh) ekor Kab. Cirebon, 6 (enam) ekor Kab. Sukabumi, 7 (tujuh) ekor Kab. Indramayu dan 3 (tiga) ekor Kab. Subang.

- Tidak tercapainya target 0 kasus Rabies dengan terjadinya 2 kasus positif rabies pada anjing pada tahun 2016 di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian rabies belum berjalan optimal, diharapkan pada tahun 2017 kegiatan vaksinasi dan surveillans lebih ditingkatkan sehingga rabies dapat dikendalikan dengan lebih baik.
- i) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat melalui 7 (tujuh) UPTD diantaranya 5 (lima) UPTD pembibitan, dan 2 UPTD pengujian serta 2 (dua) instalasi dibawah UPTD, sampai dengan 31 Desember 2016 telah diperoleh PADS sebesar Rp. 4.837.014.275,- (127,27%) dari target Rp. 3.800.575.000.

4.2. Kendala, Hambatan dan Pencapaian Kinerja serta Tingkat Antisipatif

Pada tahun 2016 pelaksanaan fasilitasi pembangunan peternakan ditujukan dalam rangka pencapaian (1) Peningkatan Produksi Ternak dan Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Berdaya Saing, (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis, (3) Menyediakan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), dan (4) Meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraan Peternak; sehingga antisipatif lebih difokuskan terhadap kendala dan hambatan pencapaian target dan sasaran program prioritas tersebut, sebagaimana berikut :

- i. Beberapa upaya dalam rangka peningkatan produksi dari aspek hulu sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada tahun mendatang melalui berbagai kegiatan yaitu :
 - Pengembangan Sumber Daya Genetik (Sapi Pasundan, Domba Garut, Itik Cihateup, Itik Rambon, Ayam Sentul dan Ayam Pelung, Itik Pajajaran) melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian di Bidang Peternakan.

- Penyusunan Program Konservasi Sapi Pasundan dari aspek prioritas pengembangan dan pola yang diimplementasikan di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dengan lokasi pengembangan konservasi agroekosistem sapi pasundan di Kecamatan Ciemas dan agroekosistem wilayah Hinterland di Kecamatan Ciracap.
- Penanganan Gangguan Reproduksi pada ternak sapi dilaksanakan melalui pemeriksaan status reproduksi dan pengobatan ternak di 24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- Sinkronisasi Birahi pada ternak sapi bertujuan untuk penyerentakan birahi ternak khususnya ternak sapi potong dan sapi perah dalam rangka efisiensi pelaksanaan inseminasi buatan (IB).
- Pembayaran nilai kompensasi penggunaan lahan PTPN VIII di Blok Pejaten Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor : SP/V.3/1071/XII/2014 – Nomor: 119/4334/Disnak/Prasar/2014 tanggal 1 Desember 2014 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Perkebunan Nusantara VIII tentang Pengelolaan Peternakan Komunal Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Gerakan Citarum Bestari dengan nilai Rp. 790.154.248,- (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) saat ini belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan nilai antara Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Hasil Appraisal PPTK Gambung selaku Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Anggaran yang tersedia dalam DPA Kegiatan GCB-Penataan Kawasan peternakan di Hulu DAS Citarum sebesar Rp. 229.500.000,- Perlu dilakukan pembahasan ulang terhadap nilai kompensasi penggunaan lahan Blok Pejaten untuk pembangunan kandang komunal.
- Peningkatan kinerja sumberdaya dan kelembagaan peternakan dengan pembinaan pemanfaatan teknologi peternakan antara lain melalui :
 - Peningkatan pemanfaatan alsin peternakan dengan kegiatan Bimtek Perbengkelan Alsin. Tujuan dari kegiatan adalah untuk meningkatkan optimalisasi alsin peternakan di kelompok ternak yang tersebar di wilayah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Subang dan Sumedang.
 - Pemetaan Penerapan Alsin Berbasis GIS (Geographic Information Spasial), dengan tujuan mengidentifikasi sebaran alat dan mesin peternakan di Jawa Barat sebagai bahan kebijakan untuk peningkatan dan penambahan alsin peternakan guna menunjang proses budidaya ternak dari kelompok.

- Sosialisasi teknologi di bidang peternakan serta pendampingannya, yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang peternakan khususnya di bidang pengolahan limbah kotoran ternak di lokasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR).
- ii. Sedangkan upaya peningkatan produksi dari aspek hilir sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada tahun mendatang melalui berbagai kegiatan yaitu :
 - Pembinaan kepada unit produsen, pelaku usaha pengolahan produk peternakan, distributor dan ritel serta pasar tradisional tentang penerapan higiene sanitasi serta pengolahan produk peternakan sesuai dengan standar kesmavet.
 - Sosialisasi kepada konsumen tentang kualitas Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- iii. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yaitu terhadap penyakit Avian Influenza (AI), Anthrax, Brucellosis dan Rabies
 - Belum diketahuinya pola penggigitan Hewan Penular Rabies akibat belum optimalnya penanganan dan pelaporan kasus penggigitan, baik oleh masyarakat, petugas kesehatan mau pun petugas kesehatan hewan. Upaya yang dilakukan dengan Peningkatan kapasitas petugas kesehatan hewan untuk melaksanakan deteksi dini, penanganan dan pelaporan kasus penggigitan HPR;
 - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya rabies dan PHMS lainnya. Upaya yang dilakukan peningkatan koordinasi dengan dinas kesehatan dan unit lainnya untuk mengevaluasi pola penggigitan HPR.
 - Masih lemahnya deteksi dini penggigitan HPR sehingga terjadi 2 kasus positif rabies pada anjing liar di Kab Sukabumi dan Kota Sukabumi. Upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi PHMS ke masyarakat
 - Pengujian brucellosis dilaksanakan oleh beberapa laboratorium veteriner yaitu BP3HK Cikole, Bvet Subang dan Bbalitvet Bogor. Namun sampai saat ini hasil pengujian tersebut belum dikaji secara akademik sehingga belum diketahui real prevalensi brucellosis. Perlu adanya pengkajian manajemen risiko penyakit lebih lanjut.
 - Sejak tahun 2009 sudah 9 tahun tidak muncul kasus positif anthrax pada hewan. Namun risiko munculnya kasus tersebut tetap tinggi akibat meningkatnya lalulintas hewan dan produk hewan ke Jawa Barat. Perlu pengkajian risiko munculnya anthrax pada hewan di Jawa Barat. Solusi lain perlu adanya bantuan sarana pemberantasan PHMS.
 - Pengendalian PHMS di Jawa Barat dinilai masih belum optimal. Hal ini disebabkan

belum optimalnya penyediaan dan kapasitas petugas, sarana prasarana, serta biaya operasional. Untuk itu perlu diperhatikan penyusunan draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan.

- Arus lalulintas hewan dan produk hewan yang dibawa masuk, keluar atau melalui Jawa Barat setiap tahun semakin meningkat. Namun sampai dengan saat ini Jawa Barat belum mempunyai pengaturan tentang persyaratan pemasukan/pengeluaran, prosedur pemasukan/pengeluaran, penerbitan sertifikat veteriner. Harus ditingkatkannya koordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah
- Masih ada perbedaan cara melaksanakan pemeriksaan hewan dan produk hewan yang dilakukan oleh Pos Pemeriksaan (Check Point) Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas petugas Check Point
- Masih adanya produsen yang belum memiliki izin usaha dan masih ada obat hewan ilegal yang beredar di tingkat pengecer. Hal ini disebabkan belum tersosialisasikannya peraturan registrasi obat hewan. Sebagai solusinya sosialisasi peraturan obat hewan dan penertiban usaha obat hewan.